

PD/DRPM-ITS/021

ADVANCING
HUMANITY



DRPM
DIREKTORAT RISET DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KOLABORASI INDONESIA TAHUN 2026



Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2026



PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI ITS TAHUN 2026

PENANGGUNG JAWAB

Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian

Agus Muhamad Hatta

TIM PENYUSUN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM)

Fadlilatul Taufany

Mokhamad Nur Cahyadi

Nurul Jadid

Shintami Chusnul Hidayati

KATA PENGANTAR

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) adalah inisiatif bersama 24 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk mendukung Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Melalui pengabdian masyarakat, PTNBH berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, serta memperkuat ekonomi lokal, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat desa ini bertujuan menjadikan desa pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mendukung Asta Cita, PMKI juga berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi untuk 74.953 desa, 271 kawasan perdesaan, serta 62 daerah tertinggal dalam RPJMN 2025–2029. Pengabdian ini mencakup penerapan teknologi tepat guna, sains, desain, model bisnis, infrastruktur, hingga mitigasi bencana, termasuk pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program ini diharapkan mempercepat transformasi digital melalui tahapan pembangunan terstruktur, mulai dari infrastruktur dasar (2025) hingga integrasi teknologi lingkungan berbasis digital (2029). Panduan PMKI 2026 disusun untuk mendorong dosen PTNBH berkolaborasi secara terarah dan berdampak.

Surabaya, Februari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan	5
3. Fokus Pengabdian Masyarakat	5
4. Skema Pengabdian Masyarakat	6
5. Syarat dan Ketentuan	6
5.1. Pengusul ITS sebagai Pengabdi Utama atau <i>Host</i>	6
5.2. Pengusul ITS sebagai Pengabdi Mitra	6
5.3. Susunan Tim Pengabdi Internal ITS	7
5.4. Proposal	7
5.5. Dana Program	7
6. Mekanisme	9
7. Luaran	10
8. Jadwal.....	11
9. Penutup.....	11
Lampiran 1: Format Proposal	12
Lampiran 2: Formulir Kesiapan Pelaksana Mitra	16
Lampiran 3: Daftar keywords Sustainable Development Goals (SDGs)	17
Lampiran 4. Tabel peningkatan level keberdayaan mitra sasaran (pengetahuan, keterampilan, aksesibilitas dan pendapatan) yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif.....	24

1. Latar Belakang

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam mendukung pencapaian Golden Standard 2030 Diktisaintek menargetkan kemitraan masyarakat, baik ditingkat nasional/ internasional yang lebih luas, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, terutama melalui pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan SDGs. Program pengabdian masyarakat ITS harus memiliki indikator yang jelas dan terukur, dengan *baseline* dan *outcome* yang terdokumentasi dengan baik sebagai bukti adopsi dan dampak yang nyata. Melalui pendekatan ini, ITS berharap dapat memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam riset dan pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi internasional dan pemberdayaan berbasis dampak.

Tabel I.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak

No.	Kontribusi pada Masyarakat	IKU Kemendiktisaintek
1	Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDGs	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan) dan 2 (dua) SDGs lain unggulan ITS.
2	Peringkat PT pada QS WUR	Peringkat 100 - 310
3	Peringkat PT pada THE Impact Ranking	Peringkat 1 - 100

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berkomitmen untuk mencapai target kinerja Diktisaintek yang tercantum dalam RENSTRA 2026-2030 (Tabel I.2), dengan fokus yang kuat pada dampak terhadap masyarakat, dan reputasi institusi. Pada tahun 2030, ITS menargetkan pada peningkatan kolaborasi dengan industri, dan pengakuan dikancah global, dan keterlibatan pada aktivitas pengabdian berdampak diskala nasional maupun internasional. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan reputasi institusi ITS melalui ketercapaian pemeringkatan pada QS WUR sebesar 300 dan peringkat THE Impact sebesar 50 (**Tabel I.2**)

Tabel I.2 Indikator Kinerja Riset dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan RENSTRA ITS 2026-2030

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Jenis
			2026	2027	2028	2029	2030	
Peningkatan Dampak Pengabdian Pada Masyarakat dan Industri								
1	Rasio Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen	%	2,60	2,75	2,90	3,05	3,20	Renstra ITS*
Peningkatan Reputasi dan Citra Institusi								
1	Peringkat QS WUR	%	460	420	380	340	300	Renstra ITS*
2	Peringkat THE Impact	%	101-200	80	70	60	50	Renstra ITS*

*Sumber draft RENSTRA ITS 2026-2030

Pada tahun 2025, beberapa capaian IKU ITS terkait pengabdian masyarakat berhasil melampaui ekspektasi, diantaranya:

1. Jumlah luaran HKI pengabdian masyarakat sebesar 145 judul, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 45% di atas target, mencerminkan peningkatan produktivitas dalam perlindungan kekayaan intelektual hasil pengabdian masyarakat;
2. Jumlah desa atau komunitas binaan sebesar 280 kawasan, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 40% di atas target, menunjukkan dampak nyata program pembinaan yang semakin luas;
3. Jumlah produk Abmas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 146 produk, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 46% di atas target, menandakan keberlanjutan inovasi dalam pengembangan solusi berbasis teknologi;
4. Jumlah publikasi jurnal nasional pengabdian masyarakat, dalam jurnal SEWAGATI, sebesar 156 artikel;
5. Jumlah mahasiswa yang mengikuti KKN yang terlibat sebesar 1.500 mahasiswa yang tercatat pada website <https://data.its.ac.id/kkn> .

Kerjasama pengabdian masyarakat kolaboratif antar PTNBH, dalam bentuk program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI), membuka peluang lebih besar untuk menciptakan kawasan binaan yang lebih luas, meningkatkan publikasi ilmiah dalam jurnal pengabdianmasyarakat, dan menghasilkan lebih banyak produk tepat guna yang dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat. Melalui sinergi ini, PMKI diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah, termasuk desa-desa tertinggal, serta berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai bagian dari agenda RPJMN 2025–2029.

Adapun 24 Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang tergabung dalam program PMKI ini adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Terbuka (UT), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

2. Tujuan

Tujuan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) adalah:

1. Meningkatkan Dampak Pengabdian Masyarakat

Memperkuat sinergi antar PTNBH dalam pelaksanaan program pengabdian guna memperluas jangkauan, efektivitas, dan keberlanjutan dampak program, termasuk dalam konteks penanganan dan pemulihan pascabencana.

2. Mendukung Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM)

Berkontribusi pada peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa, sesuai dengan target RPJMN 2025–2029, untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

3. Mendorong Sinergi Lintas Keilmuan

Mengintegrasikan disiplin teknologi, sains, seni, humaniora, pendidikan, dan bisnis untuk memberdayakan masyarakat desa, termasuk dalam pembangunan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana.

4. Meningkatkan Ekosistem Pengabdian Masyarakat

Mendorong budaya kolaboratif antar-disiplin dan antar-institusi untuk menghasilkan program pengabdian yang relevan, responsif terhadap krisis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Fokus Pengabdian Masyarakat

Fokus pengabdian masyarakat mencakup berbagai bidang prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal, wilayah rentan, dan wilayah terdampak bencana. Bidang-bidang tersebut meliputi penyediaan air bersih, konektivitas internet dan jaringan listrik, pengolahan pangan dan pasca-panen, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta bidang seni dan sosial humaniora, yang mencakup:

- Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar desa;
- Pemulihan layanan pendidikan formal dan nonformal, pencegahan learning loss, serta penguatan literasi kebencanaan;
- Pemulihan ekonomi lokal dan mata pencaharian masyarakat terdampak;
- Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan bencana berbasis kearifan lokal dan pendekatan daerah aliran sungai (DAS).

Melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi, pengabdian ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membangun desa yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

4. Skema Pengabdian Masyarakat

Skema Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) yang ditawarkan oleh ITS di tahun 2026 adalah **PMKI Skema A (Reguler)**. Skema ini adalah pengabdian masyarakat yang berkolaborasi antara 24 PTNBH, yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Terbuka (UT), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

5. Syarat dan Ketentuan

Adapun kriteria pengusulan proposal pada kedua skema diatas adalah sebagai berikut:

5.1. Pengusul ITS sebagai Pengabdi Utama atau *Host*

1. Dosen ITS aktif, ber-NUPTK, dan minimal berkualifikasi Magister (S2);
2. Memiliki karya inovasi yang diimplementasi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dibuktikan dengan tautan berita di media online;
3. Memiliki rancangan implementasi karya sains, teknologi dan humaniora serta mitra pelaksana pengabdian yang **bersedia** untuk melaksanakan pengabdian masyarakat;
4. **Wajib** melibatkan minimal 2 (dua) anggota mitra dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda dan berkualifikasi minimal Magister (S2);
5. Berafiliasi pada salah satu Pusat Studi dengan sinergi keterlibatan lintas sumber daya pengabdian masyarakat antar Pusat Studi / Klaster / Fakultas / Departemen.

5.2. Pengusul ITS sebagai Pengabdi Mitra

1. Dosen ITS aktif ber-NUPTK, dan minimal berkualifikasi Magister (S2);
2. Memiliki karya inovasi yang diimplementasi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dibuktikan dengan tautan berita di media online;
3. Mitra harus memiliki rekam jejak karya maupun kegiatan pengabdian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta prototipe/model yang tersedia untuk diimplementasi.

5.3. Susunan Tim Pengabdian Internal ITS

Bagi Pengusul ITS yang berperan sebagai Pengabdian Utama atau Host maupun sebagai Pengabdian Mitra, pada pelaksanaan kegiatan juga dapat melibatkan anggota yang berasal dari internal ITS dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggota internal adalah dosen tetap ITS, berkualifikasi minimal Magister (S2), aktif, dan memiliki NUPTK;
2. Anggota internal berjumlah 5-10 orang dosen ITS dan bisa melibatkan mitra di luar ITS;
3. Rekam jejak setiap anggota tim pengusul pengabdian masyarakat sedapat mungkin sesuai dengan bagian tugasnya di dalam pengabdian masyarakat yang diusulkan;
4. **WAJIB** *inline* dengan roadmap pengabdian masyarakat Pusat Studi;
5. **WAJIB** melibatkan mahasiswa dalam bentuk KKN pengabdian masyarakat yang beranggotakan minimal 10 orang.

5.4. Proposal

1. Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia;
2. Desa yang disasar tidak harus masuk kategori Wilayah 3T / perbatasan RI;
3. Proposal di-submit oleh Ketua Pelaksana Perguruan Tinggi *Host*;
4. Pelaksana (*Host*) mengusulkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 2 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

5.5. Dana Program

1. Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
2. Pelaksana dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan pendanaan dengan jumlah yang cukup untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sumber dana berasal dari kontribusi Perguruan Tinggi Utama serta masing-masing Perguruan Tinggi Mitra, disesuaikan dengan ketersediaan dana dari PTNBH, baik sebagai host maupun mitra.

Pendanaan PMKI skema A (Reguler) ini mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengabdian ITS sebagai *Host* dapat mengajukan usulan dana maksimal sebesar Rp. 75.000.000,00 dan
- b. Pengabdian ITS sebagai Mitra dapat mengajukan usulan dana maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00;

3. Besar penggunaan dana mengikuti ketentuan SBM dan Panduan Keuangan Kegiatan yang berlaku;
4. Dana dapat dianggarkan untuk:
 - a. Bahan habis;
 - b. Alat penunjang/aset;
 - c. Pengumpulan Data;
 - d. Sewa Peralatan;
 - e. Analisa Data;
 - f. Pelaporan Luaran Wajib/Tambahan;
 - g. Perjalanan Dinas untuk tujuan Monev;
 - h. Total anggaran (poin a sampai g) adalah maksimum 100%; dan
 - i. Semua pendanaan termasuk pajak.
5. Dana tidak dapat digunakan untuk:
 - a. Honorarium Ketua dan Anggota Pengabdian Dosen;
 - b. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa;
 - c. Pembelian atau sewa tempat, meubelair, dll;
 - d. Pembelian kendaraan operasional;
 - e. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain; dan
 - f. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.
6. Komponen Penggunaan Anggaran PMKI mengacu pada aturan yang ditetapkan DPPM Kemendiknas (Panduan Penelitian dan Pengabdian tahun 2026) yaitu:
 - a. Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%) ;
 - b. Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%) ;
 - c. Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%) ;
 - d. Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 15%) ;
 - e. Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%).

6. Mekanisme

Adapun mekanisme dan rancangan kegiatan diantaranya :

- a. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah/Pusat-pusat di masing-masing 24 PTNBH;
- b. Proposal beserta dokumen pendukung dalam bentuk softcopy dikirim melalui website Sistem Informasi PMKI: <https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/>;
- c. Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) reviewers yang berasal dari 24 PTNBH;
- d. Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan pengabdian masyarakat, rekam jejak pelaksana, serta ketercapaian keluaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh pelaksana pengabdian;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke-1 dan ke-2 wajib dihadiri oleh pelaksana utama. Namun, pelaksana mitra yang ingin menghadiri monitoring dan evaluasi bersama pelaksana utama dipersilakan;
- g. Kegiatan monitoring dan evaluasi ke-1 akan diselenggarakan langsung di lokus desa terpilih;
- h. Biaya perjalanan dinas untuk pelaksana utama dan/atau pelaksana mitra menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran pengmas yang telah diterima;
- i. Jika pelaksana utama berhalangan menghadiri monitoring dan evaluasi, maka pelaksana mitra yang ditugaskan dapat menggantikan;
- j. Dokumen Laporan ke-1 (Laporan Kemajuan) dan Laporan ke-2 (Laporan Akhir) beserta dokumen pendukung dalam bentuk softcopy dikirim melalui website Sistem Informasi PMKI: <https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/>.

7. Luaran

Tim Pelaksana ITS baik sebagai *host* maupun mitra diwajibkan menghasilkan luaran sebagai :

- a. Jurnal Nasional. Artikel ilmiah dimuat di Jurnal SEWAGATI (<https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/index>) atau jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat lainnya yang terakreditasi minimal Sinta 4 (<https://sinta.ristekbrin.go.id/journals>);
- b. Berita Populer Media Massa. Berita yang dimuat di ITS Online (its.ac.id/news) atau dimuat di media massa yang terdaftar di dewan pers (<https://www.dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>). Berita bukan merupakan opini atau jurnalisme-warga. Konten atau redaksional dari berita populer media massa tersebut wajib dikaitkan dengan isu dampak SDGs dan peningkatan minimal 2 (dua) level keberdayaan mitra sasaran (pengetahuan, keterampilan, aksesibilitas dan pendapatan) yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat dilihat pada **Lampiran 4**;
- c. Video kegiatan. Aktivitas pengabdian masyarakat harus dipublikasikan dalam format video yang diunggah di akun Youtube DRPM ITS (<https://www.youtube.com/drpmits>) dan tersedia secara publik di internet serta **wajib** didaftarkan hak ciptanya. Konten dari video tersebut wajib dikaitkan dengan isu dampak SDGs dan peningkatan minimal 2 (dua) level keberdayaan mitra sasaran (pengetahuan, keterampilan, aksesibilitas dan pendapatan) yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat dilihat pada **Lampiran 4**;
- d. Produk yang telah dihasilkan, harus mendapatkan pengakuan dalam bentuk:
 - Paten/ Paten Sederhana/ Desain Industri, atau
 - Sertifikat Halal/ SNI, atau
 - Ijin Edar PIRT/ BPOM, NIB atau
 - Perusahaan rintisan/ teaching industry, atau
 - Kebijakan/ Policy Brief/ Naskah Akademik/ Tanggapan dan Masukan RPP yang diserahkan secara resmi kepada pemerintah/ industri/ mitra lainnya.

Catatan: Proposal yang diusulkan melalui Pusat Studi Teknologi Tepat Guna, **WAJIB** mendapatkan pengakuan dalam bentuk **Paten, Paten Sederhana, atau Desain Industri dengan status minimal: terdaftar.**

8. Jadwal

Tanggal-tanggal penting:

Launching	:	11 – 13 Februari 2026
Penerimaan Proposal	:	13 Februari – 7 Maret 2026
Evaluasi Proposal	:	7 Maret – 6 April 2026
Penetapan Penerima Dana	:	6 – 16 April 2026
Pengumuman Hasil Evaluasi Proposal	:	17 April 2026
Acara Penandatanganan Kontrak	:	20 April 2026 (Universitas Sriwijaya)
Pelaksanaan Kegiatan	:	20 April – 30 November 2026
Pemasukan Laporan Kemajuan	:	26 – 31 Agustus 2026
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-1	:	2 – 4 September 2026 (Universitas Pendidikan Indonesia)
Pemasukan Laporan Akhir	:	24 – 30 November 2026
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-2	:	2 - 4 Desember 2026 (Universitas Negeri Semarang)

9. Penutup

Pertanyaan terkait bantuan ini dapat dilayangkan melalui e-mail atau WA sebagai berikut :

- Kasubdit Pengabdian kepada Masyarakat (Nurul Jadid), WA : 0813-3309-3232 terkait Teknis Panduan;
- Kasubdit Data dan Layanan Ilmiah (Shintami Chusnul Hidayati), email: shintami@its.ac.id terkait Platform website Sistem Informasi PMKI.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan institusi.

**PROPOSAL
PENGABDIAN MASYARAKAT
KOLABORASI INDONESIA (PMKI) 24 PTNBH
SKEMA A (REGULER)
DANA ITS TAHUN 2026**



JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT

.....

Pelaksana Utama : <<Nama dan institusi>>

Pelaksana Mitra :

1. <<Nama dan institusi>>
2. <<Nama dan institusi>>
3. <<Nama dan institusi>>

**<< INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER >>
<<Bulan>>, 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
IDENTITAS PROPOSAL	1
1 RINGKASAN PROPOSAL	2
2 PENDAHULUAN	2
2.1 Latar belakang masalah	2
2.2 Tujuan	2
3 METODOLOGI	2
4 RENCANA PENELITIAN	2
5 DAFTAR PUSTAKA	2
6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)	2
7 JADWAL PELAKSANAAN	2
8 PETA JALAN	2
9 USULAN BIAYA	2
10 CV PENELITI	2

IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul :
2. Pengusul
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jabatan Fungsional/Golongan :
 - c. NIP :
 - d. Departemen :
 - e. Fakultas :
 - f. Perguruan Tinggi :
 - g. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
 - h. Alamat Rumah/Telp/HP :

3. Pengabdian Mitra

No	Nama Pengabdian	E-mail	Departemen/ Fakultas	Institusi/ Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian

4. Skema yang diusulkan : PMKI – A (Reguler)
5. Total Biaya yang diusulkan : Rp.
6. Target Implementasi Karya Pengabdian :

No.	Karya Sains/TTG yang diimplementasi	Jumlah Artikel
1.		
2.		

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui,
Direktur Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat - ITS

Surabaya,
Pengabdian Utama

Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.
NIP. 198107132005011001

.....
NIP.

1 RINGKASAN PROPOSAL

2 PENDAHULUAN

2.1 Latar belakang masalah

2.2 Tujuan

3 METODOLOGI

4 RENCANA PELAKSANAAN

(a) Pelaksanaan pengabdian masyarakat di PT-*host*

(b) Pelaksanaan pengabdian masyarakat di PT-mitra
(maksimum 1 halaman tiap pelaksana mitra)

5 DAFTAR PUSTAKA

6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	JUMLAH	DESKRIPSI
1	Keluaran (<i>output</i>) Hasil Pengabdian Masyarakat		
2	Dampak (<i>outcome</i>) Hasil Pengabdian Masyarakat		
3	Pembinaan <i>peer</i>		
4	Publisitas		

7 JADWAL PELAKSANAAN

8 PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGABDIAN MASYARAKAT

9 USULAN BIAYA

10 CV PELAKSANA

Lampiran 2: Formulir Kesiediaan Pelaksana Mitra

FORMULIR KESEDIAAN PELAKSANA MITRA PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama Pelaksana Mitra : _____
NIP : _____
Perguruan Tinggi : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Program Studi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia skema A (PMKI – A) Tahun 2026 dengan:

Nama Pelaksana Utama : _____
NIP : _____
Perguruan Tinggi : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Judul Pelaksanaan : _____

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Ketua/Direktur LPPM/DRHPM

Surabaya,
Yang menyatakan,
Pengabdi Mitra

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 3: Daftar keywords Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
Developing countries	Agricultural Orientation index	Access to clean water and sanitation	Access to education	Basic living standards	Accessible water	Affordable energy	Aid for trade	Access to the internet	Affordable housing	Adaptable	Capitalism	Average global temperature	Artisanal fishers	Afforestation	Abuse	Capacity building
Basic services	Agricultural productivity	Affordable medicines	Basic education	Dignity	Affordable drinking water	Alternative energy	Banking	Affordable access	Age	Adaptation	Cars	Carbon	Biodiversity	Agriculture	Accountability	Civil society partnerships
Class	Agriculture	AIDS	Basic literacy	Disadvantaged	Aquifer	Animal waste	Child labour	Affordable credit	Ageism	Affordable housing	Circular economy	Carbon dioxide	Carbon dioxide	Animals	Accountable institutions	Communication technologies
Disadvantaged	Consume	Air contamination	Basic literacy skills	Discrimination	Cities	Battery	Child soldiers	Clean technologies	Business	Air pollution	Commercial enterprises	Changing weather patterns	Coastal biodiversity	Arable land	Arbitrary detention	Debt sustainability
Economic resources	Crop diversity	Air pollution	Cultural diversity	Employment	Clean water	Carbon	Creativity and innovation	Cooperation	Children	Air quality	Consumer levels	Climate	Coastal ecosystems	Bees	Arms	Development assistance
End poverty	Crops	Alcohol abuse	Disability	Empower girls	Contaminated	Charcoal	Culture	Data banks	Culture	Cities	Consumerism	Climate action	Coastal habitats	Biodiversity	Arms trafficking	Disaggregated data
Environment	Doha Development Round / Doha Round	Antenatal care	Disability and education	Empowerment	Defecation	Clean energy	Decent work	Economic development	Developing countries	Climate change	Consumption	Climate adaptation	Coastal parks	Biodiversity loss	Birth registration	Doha Development Agenda
Equality	End hunger	Antiretroviral	Early childhood	Empowerment of women / empower women / women's empowerment	Desalination	Clean energy technology	Decent work for all	Electrical power	Developing states	Community	Deep decarbonisation	Climate and gender	Coastal resources	Conservation	Bribery	Entrepreneurship
Extreme poverty	Environment	Antiretroviral therapy	Early childhood development	Equal access	Diarrhoeal diseases	Clean fuel technology	Development oriented policy	Energy	Development assistance	Cultural heritage	Ecological	Climate and infectious disease	Coastlines	Deforestation	Combat terrorism	Environmentally sound technologies
Financial inclusion	Food	Biomedical	Education	Equal opportunities	Drought	Clean fuels	Economic growth	Enterprises	Disabilities	Decentralisation	Efficient use of resources	Climate and politics	Conserve	Desertification	Conflict resolution	Foreign direct investment

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
																s
Income	Food gap	Bodily autonomy	Education for sustainability	Equality	Dumping	Cleaner fossil fuel technology	Economic productivity	Environmentally sound technologies	Discrimination	Development planning	Energy	Climate change	Conserve oceans	Drought	Conflicts	Fostering innovation
Income equality	Food production	Child deaths	Education in developing	Exploitation	Ecosystem protection	Climate goal	Economy	Financial services	Discriminatory	Disaster management	Energy consumption	Climate change management	Coral bleaching	Drylands	Corruption	Free trade
Microfinance	Food reserves	Contraceptive use	Enrolment	Female genital mutilation	Ecosystem restoration	Coal	Enterprises	ICT infrastructure	Economy	Disaster risk reduction	Energy efficiency	Climate change planning	Coral reef	Ecosystem	Discrimination	Fundamental principles of official statistics
Non-discrimination	Food Security	Death rate	Equal access	Feminism	Equitable sanitation	Electricity	Entrepreneurship	Industrial diversification	Education	Disaster Strategy	Energy use	Climate change policy	Ecosystem management	Ecosystem restoration	Education	Global partnership
Poor	Genetic diversity	Dental	Equal education	Forced marriage	Floods	Electricity infrastructure	Equal pay	Industrialisation	Empower	Disasters	Food	Climate early warning	Fish species	Ecosystems	Enforced disappearance	Global partnership for sustainable development
Poor and vulnerable	Genetic diversity of seeds	Disability and family support	Equitable education	Gender	Fresh water	Emissions	Finance	Information and communication technology	Equal opportunity	Fine particulate matter	Food losses	Climate hazards	Fish stocks	Extinct	Equal access	Global stability
Poverty	Genetics	Disability and inclusion	Gender disparities in education	Gender discrimination	Hydropower	Energy	Financial services	Infrastructure	Equality	Green spaces	Food supply	Climate impact	Fish stocks AND FISHERIES MANAGEMENT	Extinct species	Equity	International aid
Poverty eradication	Hunger	Disability and politics of location	Gender disparity	Gender equality/parity	Hygiene	Energy efficiency	Forced labour	Innovation	Equity	Heritage	Food waste	Climate mitigation	Fisheries	Extinction	Exploitation	International cooperation
Poverty line	Hungry people	Diseases	Gender equality	Governance and gender	Improving water	Energy infrastructure	GDP growth	Internet access	Ethnicity	Housing	Fossil fuel subsidies	Climate refugees	Fishers	Forest	Flow of arms	International population and

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
																housing census
Quality of Life	Improved nutrition	Family planning	Gender equity	Human rights	Inadequate water	Energy research	Global resource efficiency	Irrigation	Financial assistance	Human settlements	Future proof	Climate related hazards	Fishing	Forest management	Freedom	International support
Resources	Innovations and health	Health	Gender sensitive	Human trafficking	Inadequate water supply	Energy technology	Global trade	Knowledge in education for all	Foreign aid	Impact of cities	Global food waste	Climate resilience	Fishing practices	Forests	Geography of poverty	International support for developing countries
Social protection systems / social protection	Legumes	Health in resource-constrained settings	Global citizenship	Humanitarian	Infrastructure	Fossil-fuel	Gross domestic product growth	Mobile networks in developing countries	Foreign investment	Inadequate housing	Greenhouse gasses	CO2 capture	Global warming	Genetic resources	Governance	Knowledge sharing
Sustainable	Maize	Health worker density	Global education	Marginalised	Irrigation	Green economy	Human trafficking	National Security	Gender	Informal settlements	Harvest losses	CO2 conversion	Illegal fishing	Illegal wildlife products	Hate crime	Multi-stakeholder partnerships
Third World	Malnourished	Healthy	Inclusion and education	Parity	Lakes	Greenhouse gas	Inclusive economic growth	Network infrastructure	Global financial markets	Infrastructure	Life cycle	COP 21	Kelp	Illicit trafficking	Human rights	Poverty eradication
Vulnerable	Malnutrition	Healthy lives	Inclusive	Pay	Latrines	Greenhouse gas emissions	Innovation	Phone service	Health	Land	Market distortions	COP 22	Law of the Sea	Indigenous	Human trafficking	Public-private partnerships
Wealth distribution	Nutrition	Hepatitis	Innovation	Reproductive rights	Open defecation	Hydroelectric	Insurance	Public policy	Homelessness	Land consumption	Materialism	Ecosystems	Marine	Indigenous populations	Illegal arms	Science cooperation agreements
	Nutritional needs	HIV	International cooperation	Sexual and reproductive health	Pollution	Low carbon	Job creation	Quality of life	Homophobia	Local materials	Materials goods	Emissions	Marine areas	Invasive alien species	Illicit financial flows	Technology cooperation agreements
	Nutritious	Improving mortality	Learning opportunities	Sexual exploitation	Recycled water	Modern electricity	Jobs	Regional infrastructure	Human rights	mitigation	Monitoring sustainable development	Extreme weather	Marine biodiversity	Land conservation	Inclusion	Technology transfer
	Poverty	Increasing	Lifelong	Sexual violence	Reuse	Modern	Labour	Research	Inclusive	Natural	Natural	Extreme	Marine	Land	Inclusive	Weighted

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
		g life expectancy	g learning			energy	market		on	disasters	resources	weather events	ecosystems	degradation	institutions	tariff average
	Produce	Indigenous	Literacy	Social inclusion	River basins	Reliable energy	Labour rights	Resilient infrastructure	Income growth	Natural heritage	Obsolescence	Global mean temperature	Marine fisheries	Land loss	Inclusive societies/society	Women entrepreneurs
	Productivity	Infected	Literacy skills	Trafficking	Rivers	Renewable	Micro finance	Resource use efficiency	Income inequality	Over crowding	Overconsumption	Global temperature	Marine Parks	Land use and sustainability	Institutions	World Trade Organization
	Quality of life	International health policy	Numeracy	Universal health coverage	Safe drinking water	Renewable energy	Migrant workers	Roads	Indigenous	Pollution	Production	Global warming	Marine pollution	Manage forests	Internally displaced	
	Resilient agriculture	International health regulations	Preprimary education	Violence	Sanitation	Renewable power	Modern slavery	Sanitation	Inequalities	Population	Recycle	Greenhouse gas	Marine resources	Managed forests	Judiciary	
	Rural infrastructure	Malaria	Primary education	Violence against girls	Sanitation and hygiene	Solar	Poverty eradication	Scientific research	Inequality	Population growth	Recycling	Greenhouse gas emissions	Ocean	Micro-organisms	Justice	
	Small-scale food producers	Maternal mortality	Qualified teachers	Violence against women	Sanitation management	Solar energy	Poverty line	Society	Migrant remittance	Public spaces	Reduce waste generation	Greenhouse gases	Ocean acidification	Permaculture	Justice for all	
	Stunted growth	Measles	Refugees and learning	Women	Sewerage	Solar power	Productive employment	Sustainable industrialisation	Migration	Public transport	Reduction	Ice loss	Ocean temperature	Plants	Legal identity	
	Stunting	Medical	Scholarships	Women in work	Sustainable water management	Sustainable energy	Productivity	Sustainable infrastructure	Population growth	Resilient	Renewable	Low-carbon economy	Oceanography	Poaching	National Security	
	Sufficient food	Mental health	School	Women's rights	Sustainable withdrawals	Sustainable energy services	Public policy	Technological capabilities	Poverty	Resilient buildings	Resource efficiency	Natural disasters	Oceans	Poverty	Non-violence	
	Sustainable	Mortality	School enrolment	Workplace equality	Third world	Sustainable power	Quality jobs	Technology	Public policy	Resource efficiency	Responsible production chains	Natural systems	Overfishing	Protected fauna	Organized crime	

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
	Sustainable agriculture	Mortality rate	Secondary education		Toilets	Vehicles	Quality of life	Trade	Quality of life	Resource needs	Retail	Ocean warming	Productive oceans	Protected flora	Paris principles	
	Sustainable food production	Narcotic drug abuse	Teacher training		Untreated wastewater	Wave	Resource efficiency	Transborder infrastructure	Race	Risk reduction strategy	Retail industry	Paris Agreement	Protected areas	Protected species	Peace	
	Trade diversity	Neonatal mortality	Universal education		Urban	Wind	Safe work	Transport	Racism	Road safety	Reuse	Pollution	Sea grasses	Reforestation	Peaceful societies	
	Trade restrictions	Polio	Vocational training		Waste	Wind power	Secure work	Value chains	Reduce inequalities	Safe cities	Sustainable	Renewable	Seas	Soil	Physical abuse	
	Undernourished / Undernourished	Premature mortality	Vulnerable		Wastewater	Wind turbine	Slavery	Value chains and markets	Religion	Shanty	Sustainable consumption	Sea level rise / Rising sea / Rising sea level	Sustainable ecosystems	Soil degradation	Police	
	Wasting	Preventable deaths	Women's rights		Wastewater treatment	Wood	Social policies	Water infrastructure	Rural	Slums	Sustainable management	Temperature	Unregulated fishing	Species	Prevent violence	
	World's hungry	Reducing malaria			Water		Society	Water resources	Sex	Smart cities	Sustainable practices	Warming	Water resources and policy	Strategic plan for biodiversity	Psychological abuse	
		Reducing mortality			Water access		Stable employment		Sexism	Solid waste	Sustainable production			Terrestrial ecosystems	Public policy	
		Refugees and health services			Water disasters		Stable jobs		Social protection	Suburban	Sustainable public procurement			Threatened species	Quality of life	
		Reproductive health			Water ecosystems		Sustainable consumption		Society	Sustainable	Sustainable resource use			Tree	Representative decision-making	
		Road traffic accidents			Water efficiency		Sustainable economic		Vulnerable nations	Sustainable building/s	Sustainable supply chain			Tree species	Rule of law	

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG 3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
							growth									
		Sexual and reproductive health-care			Water harvesting		Sustainable production		World trade	Sustainable cities/city	Sustainable tourism			Wetlands	Security threats	
		Sexual health			Water quality		Sustainable tourism			Sustainable communities	Vehicles				Sexual abuse	
		Soil contamination			Water resources management		Trade			Sustainable urbanisation	Waste				Sexual violence	
		Soil pollution			Water scarcity		Unemployment			Town planning	Wasteful consumption				Stolen assets	
		Tobacco control			Water supply		Well-paid jobs			Transport	Water				Tax evasion	
		Treatment of substance abuse			Water-related ecosystems		Women migrants			Transport systems	Water pollution				Theft	
		Tuberculosis			Water-use efficiency		Work			Urban	Water supply				Torture	
		Universal health					Work opportunities			Urban development					Trafficking	
		Universal health coverage					World trade			Urban planning					Transparency	
		Vaccines					Youth employment			Urban sustainability					Un-sentenced detainees	
		Vaccines in developing countries					Youth unemployment			Urbanisation					Unstable societies	
		Violence								Waste					Victims of violence	

SDG 1 (No poverty)	SDG 2 (Zero hunger)	SDG 3 (Good health and well-being)	SDG 4 (Quality education)	SDG 5 (Gender equality)	SDG 6 (Clean water and sanitation)	SDG 7 (Affordable and clean energy)	SDG 8 (Decent work and economic growth)	SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure)	SDG 10 (Reduced inequalities)	SDG 11 (Sustainable cities and communities)	SDG 12 (Responsible consumption and production)	SDG 13 (Climate action)	SDG 14 (Life below water)	SDG 15 (Life on land)	SDG 16 (Peace, justice and strong institutions)	SDG 17 (Partnerships for the goals)
		WASH								Waste generation					Violence	
		Water, Sanitation and Hygiene for All								Waste management					Violence against women and children	
		Water-borne disease								Water					Violence rates	
		wellbeing/well being/well-being								Water-related disasters					Weapon seizures	
		World Health Organisation														

Lampiran 4. Tabel peningkatan level keberdayaan mitra sasaran (pengetahuan, keterampilan, aksesibilitas dan pendapatan) yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Pengetahuan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi hasil uji/skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Pengetahuan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi hasil uji/skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi hasil uji/skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Keterampilan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi hasil uji/skor keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Keterampilan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi hasil uji/skor keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi hasil uji/skor keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Kesehatan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Kesehatan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Pendapatan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Pendapatan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Pelayanan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Pelayanan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Kualitas produk mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan kualitas produk sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Kualitas produk mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan kualitas produk sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan kualitas produk sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Jumlah produk mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan jumlah produk sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Jumlah produk mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan Jumlah produk sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jumlah produk sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Jenis produk mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan jenis produk sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Jenis produk mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan jenis produk sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jenis produk sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Kapasitas produksi mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan kapasitas produksi sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Kapasitas produksi mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan kapasitas produksi sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan kapasitas produksi sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Keberhasilan mitra melakukan ekspor	Tercapai	Dokumen Pengiriman produk ekspor	Ada/tersedia	Keberhasilan mitra melakukan ekspor	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	- Dokumen pengiriman produk ekspor - Deskripsi produk yang diekspor	- Dokumen pengiriman produk ekspor tidak ada - Deskripsi produk yang diekspor - Nama produk tidak sesuai dengan substansi pengabdian

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Keberhasilan mitra melakukan pemasaran antar pulau	Tercapai	Dokumen pengiriman produk	Ada/tersedia	Keberhasilan mitra melakukan antar pulau meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	- Dokumen pengiriman produk - Deskripsi produk yang dipasarkan	- Deskripsi produk yang dipasarkan tidak ada - Dokumen pengiriman produk tidak ada - Nama produk tidak sesuai dengan substansi pengabdian
			Deskripsi produk yang dipasarkan	Ada/tersedia				
	Jumlah aset mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan jumlah aset sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Jumlah aset meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan jumlah aset sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jumlah aset sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Jumlah omzet mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan jumlah omzet sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Jumlah omzet meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan jumlah omzet sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jumlah omzet sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Jumlah tenaga kerja mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Jumlah tenaga kerja meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Kemampuan manajemen mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi hasil uji/skor kemampuan manajemen sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Kemampuan manajemen meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	- Deskripsi - hasil uji/skor kemampuan manajemen sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi hasil uji/skor kemampuan manajemen sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	<i>Revenue generating</i> mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan Keuntungan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	<i>Revenue generating</i> meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan Keuntungan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan Keuntungan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	<i>Income generating</i> Mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan <i>income generating</i> sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	<i>Income generating</i> meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan <i>income generating</i> sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan <i>income generating</i> sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Produk tersertifikasi mitra	Tercapai	Deskripsi Produk yang tersertifikasi	Ada/tersedia	Produk tersertifikasi	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra - Nama produk - Nomor sertifikat - Lembaga pemberi sertifikasi	- Deskripsi Produk yang tersertifikasi - Sertifikat produk	- Deskripsi Produk yang tersertifikasi tidak ada - Sertifikat produk tidak ada
			Sertifikat produk	Ada/tersedia				
	Produk terstandarisasi mitra	Tercapai	Deskripsi Produk yang terstandarisasi	Ada/tersedia	Produk terstandarisasi	- Nama kelompok - Nama ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - alamat mitra - Nama produk - Nomor dokumen strandarisasi - Lembaga pemberi standarisasi	- Deskripsi Produk yang terstandarisasi - Dokumen Standarisasi	- Deskripsi Produk yang terstandarisasi tidak ada - Dokumen Standarisasi tidak ada
			Dokumen Standarisasi produk	Ada/tersedia				
	Unit usaha berbadan hukum	Tercapai	Deskripsi Unit usaha yang telah berbadan hukum	Ada/tersedia	Usaha terdaftar	- Nama kelompok - Nama ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra - Nama unit - Nomor keputusan berbadan hukum - Lembaga pemberi status badan hukum	- Deskripsi Unit usaha yang telah berbadan hukum - Dokumen keputusan berbadan hukum	- Deskripsi Unit usaha yang telah berbadan hukum tidak ada - Dokumen keputusan berbadan hukum tidak ada
			Dokumen keputusan berbadan hukum	Ada/tersedia				



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby - Kampus ITS Sukolilo Surabaya, 60111

Telp : +62 813-3325-0025 , Fax : +62 31-5955793

E-mail : drpm@its.ac.id , Website : its.ac.id/drpm

Instagram : [@its_drpm](https://www.instagram.com/its_drpm) , Youtube : DRPM ITS

